



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2. Tujuan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah



- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119));
 15. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
 28. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 30. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
 32. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 33. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 34. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 35. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4);
 37. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15);
 38. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 39. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
 40. Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 41. Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 42. Perbup Wonosobo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 43. Perbup Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. III Penjelasan pos – pos laporan keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan LRA
 - 3.1.2. Belanja LRA
- 3.2. Laporan Operasional (LO)
 - 3.2.1. Pendapatan LO
 - 3.2.2. Beban LO
- 3.3. Laporan Perubahan Ekuitasa
 - 3.3.1. Perubahan Ekuitas
- 3.4. Neraca
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas

Bab. IV Penjelasan atau informasi-informasi non keuangan

Bab. V Penutup



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Realisasi Pendapatan

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp577.769.327,00 atau 139,39% yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp169.769.327,00

Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut .:

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
			Rp.	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
RETRIBUSI JASA UMUM				
Retribusi pengawasan dan Pengendalian	408.000.000,00	577.769.327,00	169.769.327,00	139,39
RETRIBUSI JASA USAHA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah PAD	431.000.000,00	600.769.327,00	169.769.327,00	139,39
JUMLAH PENDAPATAN	431.000.000,00	600.769.327,00	169.769.327,00	139,39

B. Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.872.692.483,00 dapat direalisasi Rp10.003.688.793,00 atau 92,01%.terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp 9.133.410.383,00 dapat direalisasi sebesar Rp8.270.957.043,00 atau 90,56%. Dan Belanja Modal di rencanakan Rp 1.739.282.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.732.731.750,00 atau 99,62 %



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.319.707.623,00	2.793.122.996,00	(526.584.627,00)	84,13
<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.939.331.849,00</i>	<i>1.547.526.138,00</i>	<i>(391.805.711,00)</i>	<i>79,80</i>
Belanja Gaji Pokok ASN	1.403.328.137,00	1.172.402.500,00	(230.925.637,00)	83,54
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	157.185.078,00	121.790.858,00	(35.394.220,00)	77,48
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.910.000,00	87.730.000,00	(46.180.000,00)	65,51
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.375.000,00	54.270.000,00	(34.105.000,00)	61,41
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.450.400,00	22.705.000,00	(1.745.400,00)	92,86
Belanja Tunjangan Beras ASN	96.282.390,00	73.361.460,00	(22.920.930,00)	76,19
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.450.844,00	15.251.233,00	(20.199.611,00)	43,02
Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.000,00	15.087,00	(334.913,00)	4,31
<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>1.380.375.774,00</i>	<i>1.245.596.858,00</i>	<i>(134.778.916,00)</i>	<i>90,24</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	552.150.276,00	498.238.706,00	(53.911.570,00)	90,24
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	828.225.498,00	747.358.152,00	(80.867.346,00)	90,24
Belanja Barang dan Jasa	5.413.702.760,00	5.077.834.047,00	(335.868.713,00)	93,79
<i>Belanja Barang</i>	<i>649.733.480,00</i>	<i>644.087.602,00</i>	<i>(5.645.878,00)</i>	<i>99,13</i>
Belanja Barang Habis Pakai	649.733.480,00	644.087.602,00	(5.645.878,00)	99,13
<i>Belanja Jasa</i>	<i>4.061.381.120,00</i>	<i>3.741.923.491,00</i>	<i>(319.457.629,00)</i>	<i>92,13</i>
Belanja Jasa Kantor	3.805.399.552,00	3.521.367.930,00	(284.031.622,00)	92,54
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	91.711.768,00	59.295.172,00	(32.416.596,00)	64,65
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.500.000,00	47.498.769,00	(1.231,00)	99,99
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.250.000,00	10.420.000,00	(830.000,00)	92,62
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	96.000.000,00	93.841.620,00	(2.158.380,00)	97,75
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.519.800,00	9.500.000,00	(19.800,00)	99,79



<i>Belanja Pemeliharaan</i>	283.400.000,00	282.670.054,00	(729.946,00)	99,74
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209.400.000,00	208.695.054,00	(704.946,00)	99,66
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.000.000,00	73.975.000,00	(25.000,00)	99,97
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	305.213.160,00	296.352.320,00	(8.860.840,00)	97,10
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	305.213.160,00	296.352.320,00	(8.860.840,00)	97,10
<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	113.975.000,00	112.800.580,00	(1.174.420,00)	98,97
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.975.000,00	112.800.580,00	(1.174.420,00)	98,97
JUMLAH	9.133.410.383,00	8.270.957.043,00	(862.453.340,00)	90,55

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan dikarenakan terdapatnya sumber pendapatan baru selain pendapatan dari LPPL radio Pesona FM yaitu ,pendapatan dari pengawasan menara telekomunikasi ,namun dari pencapaian realisasi pendapatan yang didapat belum maksimal dikarenakan tagihan yang sudah diberikan kepada pihak ketiga pemilik menara tidak sepenuhnya dibayarkan oleh pemilik menara atau pembayarannya yang tidak sesuai dengan data tagihan yang dikirim.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja.

Realisasi belanja tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melebihi sembilan puluh persen namun pencapaian ini belum maksimal dikarenakan pada tahun 2023 adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda dan menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Wonosobo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain Pendapatan yang sah, dengan realisasi TA 2023, sebagai berikut :

Tabel V.1

Posisi Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika

<i>Pendapatan-LRA</i>	TA 2023		TA 2022
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	600.769.327,00	431.000.000,00	427.835.511,00
Pendapatan Transfer-LRA	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	600.769.327,00	431.000.000,00	427.835.511,00

Realisasi Pendapatan-LRA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 sebesar Rp600.769.327,00 atau 139,39% dari anggaran sebesar Rp431.000.000,00 dan mengalami kenaikan 71,21 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp427.835.511,00 Realisasi masing-masing pendapatan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut :

Tabel V.2

Pendapatan Asli Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo

<i>Pendapatan Asli Daerah-LRA</i>	TA 2023		TA 2022
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	577.769.327,00	408.000.000,00	318.757.784,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	23.000.000,00	23.000.000,00	109.077.727,00
JUMLAH PAD	600.769.327,00	431.000.000,00	427.835.511,00

Realisasi Pendapatan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp600.769.327,00 atau 139,39% dari anggarannya sebesar Rp431.000.000,00 dan mengalami kenaikan 71,21 % dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp427.835.511,00 Realisasi Ini berasal dari pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara sebesar Rp577.769.327,00 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan bangunan sebesar Rp23.000.000,00



3.1.2. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Hibah Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut :

<i>Belanja Daerah</i>	TA 2023		TA 2022
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Operasi	8.270.957.043,00	9.133.410.383,00	6.815.591.952,00
(ii) Belanja Modal	1.732.731.750,00	1.739.982.100,00	615.575.995,00
<i>Jumlah Belanja Daerah</i>	10.003.688.793,00	10.872.692.483,00	7.431.167.947,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp10.003.688.793,00 atau 92,01% dari Anggaran sebesar Rp10.872.692.483,00 dan mengalami kenaikan 74,28 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp7.431.167.947,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut :

<i>Belanja Operasi</i>	TA 2023		TA 2022
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Pegawai	2.793.122.996,00	3.319.707.623,00	2.780.572.182,00
(ii) Belanja Barang dan Jasa	5.077.834.047,00	5.413.702.760,00	4.035.019.770,00
(iii) Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	8.270.957.043,00	9.133.410.383,00	6.815.591.952,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp8.270.957.043,00 atau 90,56% dari anggaran Rp9.133.410.383,00 dan mengalami kenaikan sebesar 82,02% dari realisasi TA 2022 Rp6.815.591.952



a. Belanja Pegawai

Anggaran & Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebagai berikut :

<i>Belanja Pegawai</i>	TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.939.331.840,00	1.547.526.138,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.403.328.137,00	1.172.402.50,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	157.185.078,00	121.790.858,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.910.000,00	87.730.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.375.000,00	54.270.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.450.400,00	22.705.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	96.282.390,00	73.361.460,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.450.844,00	15.251.233,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.000,00	15.087,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.380.375.774,00	1.245.596.858,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	552.150.276,00	498.238.706,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	828.225.498,00	747.358.152,00
dst		
JUMLAH	3.319.707.623,00	2.793.122.996,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar 2.793.122.997.00 atau 84,14% dari anggaran Rp3.319.707.623,00 dengan Rincian sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023 sebesar Rp1.547.526.138,00 atau 79,80% dari anggaran yang di tentukan Rp1.939.331.849,00
- Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 sebesar Rp1.245.596,00 atau 90,24% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp1.380.375.774,00



b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebagai berikut :

<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	649.733.480,00	644.087.602,00
Belanja Barang Pakai Habis	649.733.480,00	644.087.602,00
Belanja Jasa	4.061.381.120,00	3.741.923.491,00
Belanja Jasa Kantor	3.805.399.552,00	3.521.367.930,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	91.711.768,00	59.295.172,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.500.000,00	47.498.769,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.250.000,00	10.420.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	96.000.000,00	93.841.620,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.519.800,00	9.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	283.400.000,00	282.670.054,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209.400.000,00	208.695.054,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.000.000,00	73.975.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	305.213.160,00	296.352.320,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	305.213.160,00	296.352.320,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.975.000,00	112.800.580,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.975.000,00	112.800.580,00
JUMLAH	5.413.702.760,00	5.077.834.047,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp5.077.834.047,00 atau 93,80% dari anggaran Rp5.413.702.760,00 dan mengalami kenaikan sebesar 79,46% dari realisasi TA 2022 Rp4.035.019.770,00 dengan Rincian sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp644.087.60200 atau 99,13% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp649.733.480,00
- Realisasi Belanja Jasa TA 2023 sebesar Rp3.741.923.491,00 atau 92,13% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp4.061.381.120,00
- Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp282.670.054,00 atau 99,74% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp282.670.054,00
- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp296.352.320,00 atau 97,10% dari anggaran yang di tentukan Rp305.213.160,00
- Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 sebesar Rp112.800.580 atau 98,97% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp113.975.000,00



2. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya dengan realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Belanja Modal	2023		2022
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
a. Belanja Peralatan dan Mesin	1.732.731.750,00	1.739.282.100,00	545.701.495,00
c. Belanja aset tetap Lainnya	0,00	0,00	69.874.500,00
Jumlah Belanja Modal	1.732.731.750,00	1.739.282.100,00	615.575.995,00

Ralisasi Belanja Modal pada pos belanja modal TA 2023 sebesar Rp1.732.731.750,00 atau mencapai 99,62% dari anggaran Rp1.739.282.100,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan 35,53% atau sebesar Rp615.575.995,00.

a. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga	352.517.100,00	351.714.750,00
Belanja Modal Alat Kantor	301.007.100,00	300.260.700,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.510.000,00	23.482.050,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Pejabat/Rapat Pejabat	28.000.000,00	27.972.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	117.000.000,00	112.097.000,00
Belanja Modal Alat Studio	100.000.000,00	95.100.000,00
Belanja Modal Alay Komunikasi	17.000.000,00	16.697.000,00
Belanja Modal Komputer	1.269.765.000,00	1.268.920.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	837.340.000,00	836.674.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	432.425.000,00	432.246.000,00
JUMLAH	1.739.282.100,00	1.732.731.750,00

Ralisasi Belanja pada pos belanja peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp1.732.731.750,00 atau mencapai 99,62% dari anggaran Rp1.739.282.100,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp545.701.495,00, mengalami kenaikan sebesar 31,49% dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga TA 2023 sebesar Rp351.714.750,00 atau 99,77% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp325.517.100,00
- Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar TA 2023 sebesar Rp112.097.000,00 atau 95,81% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp117.000.000,00
- Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023 sebesar Rp1.268.920.000,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp1.269.765.000,00



3.1.3 Neraca

a. Aset

Saldo Aset SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.332.588.456,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.807.204.283,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp525.384.173,00. atau 09,00%. dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

1. A Uraian	2023 (dalam Rupiah)	2022 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			dalam Rupiah	%
ASET	6.330.088.456,00	5.807.204.283,00	525.884.173,00	09,00
Aset Lancar	14.081.495,00	160.758.517,00	(146.677.022,00)	(91,24)
Aset Tetap	5.550.657.353,00	4.780.556.373,00	1.665.439.910,00	23,04
Aset Lainnya	765.349.608,00	865.889.393,00	(100.539.785,00)	(11,61)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.330.088.455,00	5.807.204.283,00	525.384.172,00	09,05
Kewajiban	10.026.823,00	3.981.504,00	6.045.319,00	151,84
Ekuitas	6.320.061.633,00	5.803.222.779,00	519.338.853,00	08,95

1. Aset Lancar

Kebijakan Akuntansi yang terkait dengan aset tetap telah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2016 tentang kodifikasi Barang Milik Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.081.495,00 jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar Rp160.758.517,00 maka mengalami *penurunan* sebesar 91,24%. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Aset Lancar TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023 (Rp.)	TA 2022 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	396.523.551,00	485.544.529,00	(89.020.978,00)	(18,33)
Penyisihan Piutang	(384.211.626,00)	(325.141.512,00)	(59.070.144,00)	18,17
Persediaan	1.769.570,00	355.500,00	1.414.070,00	397,77
JUMLAH	14.081.495,00	160.758.517,00	(146.677.022,00)	(91,24)



a. Kas dan setara Kas

Tidak Terdapat Saldo Kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2023 atau bisa dikatakan Nihil .Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 0,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari	:	593.697.648,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran piutang menarra di tahun berjalan pada TA 2023	:	570.697.648,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran piutang penyewaan gedung di tahun berjalan pada TA 2023	:	23.000.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari	:	593.697.648,00
	Jurnal koreksi atas setoran pembayaran piutang menarra di tahun berjalan pada TA 2023	:	570.697.648,00
	Jurnal koreksi atas setoran pembayaran piutang penyewaan gedung di tahun berjalan pada TA 2023	:	23.000.000,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021		0,00

b. Piutang Retribusi Daerah

Neraca Per 31 Desember 2023 menunjukkan saldo Piutang Retrubusi Daerah sebesar Rp396.523.551,00 dibanding saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp485.544.539,000 Mengalami *penurunan* sebesar Rp89.020.978,00,- atau se besar 18,33%.

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 485.544.529,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari	:	504.676.670,00
	Keteapan Pendapatan TA 2023	:	481.676.670,00
	Ketetapan Pendapatan TA 2023	:	23.000.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari	:	593.697.648,00
	Jurnal koreksi atas penyetran pembayaran piutang menarra di tahun berjalan pada TA 2023	:	570.697.648,00
	Jurnal koreksi atas penyetoran pembayaran piutang pennanyewaan bang di tahun berjalan pada TA 2023	:	23.000.000,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021		396.523.551,00



c. Penyisih Piutang

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan saldo penyisihan piutang pendapatan 31 Desember 2023 sebesar (Rp384.211.626,00-) dibanding saldo Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp325.141.512,00,-) Mengalami *kenaikan* sebesar (Rp59.070.114,00,-) atau sebesar 18.17%.

(1)	Saldo Per 31 Desember 2023	:	Dalam Rupiah (325.141.512,00)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Nihil	:	0,00 0,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Jurnal Penyesuaian Atas Beban Penyisihan Piutang TA 2023	:	59.070.114,00 59.070.114,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021		(384.211.626,00)

d. Persediaan

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.769.570,00 dibanding saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp355.500,00 Mengalami *kenaikan* sebesar Rp1.414.070,00 atau sebesar 397,77,% dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2022	:	Dalam Rupiah 355.500,00,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Jurnal Penyesuaian Atas saldo akhir persediaan yang akan di pakai berupa (Alat Tulis kantor) Jurnal Penyesuaian Atas saldo akhir persediaan yang akan di pakai berupa (Kertas dan Cover) Jurnal Penyesuaian Atas saldo akhir persediaan yang akan di pakai berupa (bahan cetak) Jurnal Penyesuaian Atas saldo akhir persediaan yang akan di pakai berupa (bahan komputer)	:	1.769.570,00 895.070,00 671.000,00 88.000,00 115.500,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Jurnal balik atas persediaan yang akan dipakai berupa (Alat Tulis Kantor) Jurnal balik atas persediaan yang akan dipakai berupa (kertas dan cover) Jurnal balik atas persediaan yang akan dipakai berupa (perabot kantor) Jurnal balik atas persediaan yang akan dipakai berupa (alat listrik)	:	355.500,00 37.500,00 61.000,00 165.000,00 92.000,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2023		1.769.570,00



2. Aset Tetap

Pada Tabel III.15 di atas menunjukkan Saldo Aset Tetap Dinas Komunikas dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2023 setelah koreksi adalah sebesar Rp5.550.657.353,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan saldo akhir Tahun 2022 sebesar Rp4.780.556.373,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp770.100.980,00 atau 16,11% dari Tahun 2022. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel III.16 Aset Tetap TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023 (dalam Rupiah)	2022 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Aset Tetap	5.550.657.353,00	4.780.556.373,00	770.100.980,00	16,11
Tanah	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.894.282.014,00	7.228.842.104,00	1.665.439.910,00	23,04
Gedung dan Bangunan	3.553.176.950,00	3.553.176.950,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.048.801.611,00)	(6.153.462.681,00)	(895.338.930,00)	14,55
Aset Lainnya	765.349.608,00	865.889.393,00	(100.539.786,00)	(11,61)
Aset Tidak Berwujud	1.005.397.860,00	1.005.397.860,00	0,00	0,00
Aset Lain- Lain	74.990.597,00	74.990.596,00	01,00	0,00
Akumulasi Aset tidak berwujud	(315.038.849,00)	(214.499.063,00)	(100.539.786,00)	46,87

a. Tanah

Tabel III.16 menunjukkan bahwa Saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp134.400.000,00 atau bisa dikatakan tidak ada penambahan maupun pengurangan koreksi/mutasi aset tanah Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun berakhir.

b. Peralatan dan Mesin

Tabel III.16 menunjukkan bahwa Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Kelurahan Kramatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.894.282.014,00 dan 2022 adalah sebesar Rp7.228.842.104,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp1.665.439.910,00 atau 23,04% dikarenakan karena terdapat adanya Mutasi/Koreksi selama TA 2023 dan adanya perubahan reklasifikasi Kode Rekening dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No



108 sehingga mengakibatkan adanya perubahan kode rekening pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.18 Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Saldo TA 2022 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
PERALATAN DAN MESIN						
Alat Besar	234.002.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.002.800,00
Alat Angkutan	676.498160,00	0,00	0,00	338.114.360,00	264.030.000,00	750.582.520,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.060.558.330,00	334.743.000,00	314.246.700,00	351.714.750,00	0,00	1.432.769.380,00
Alat Studio , Komunikasi dan , Pemancar	961.045.627,00	304.747.000,00	112.097.000,00	112.097.000,00	0,00	1.265.792.627,00
Alat Laboratorium	57.105.977,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	107.105.977,00
Komputer	4.226.876.01,00	658.779.000,00	1.063.301.500,00	1.268.920.000,00	0,00	5.091.273.510,00
Jumlah	7.228.842.104,00	1.348.269.000,00	1.489.645.200,00	2.070.846.110,00	264.030.000,00	8.894.282.014,00

Berdasarkan uraian table di atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.894.383.014,00 sedangkan pada saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.228.842,00. Penambahan Aset Tetap Koreksi/Mutasi Debet dan Kredit pada Dinas Komunikasi dan Informatika



Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2022	:	Dalam Rupiah 7.228.842.104,00
(2)	Koreksi Bertambah (Debet)	:	1.348.269.000,00
	a) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal lemari arsip	:	13.986.000,00
	b) Jurnal koreksi atas reklasifikasi Belanja Modal Komputer Jaringan	:	43.000.000,00
	c) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal peralatan jaringan	:	38.400.000,00
	d) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer unit lainnya	:	6.225.000,00
	e) Jurnal koreksi atas belanja modal peralatan komputer lainnya_LCD projector/infokus	:	5.500.000,00
	f) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_meja panjang	:	20.646.000,00
	g) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_kursi besi/metal	:	6.216.000,00
	h) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat komunikasi lainnya	:	1.750.000,00
	i) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat studio lainnya	:	24.850.000,00
	j) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya	:	141.450.000,00
	k) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer unit lainnya	:	30.500.000,00
	l) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_lemari arsip penjabat lainnya	:	2.220.000,00
	m) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat studio lainnya	:	56.250.000,00
	n) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_camera conference	:	43.000.000,00
	o) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer unit lainnya	:	179.800.000,00
	p) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal peralatan jaringan	:	1.450.000,00
	q) Jurnal koreksi atas belanja modal komputer lainnya	:	9.000.000,00
	r) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat komunikasi lainnya	:	15.247.000,00
	s) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_Board display	:	50.000.000,00
	t) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_mini komputer	:	15.000.000,00
	u) Jurnal Koreksi Atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya_P.C unit	:	9.500.000,00
	v) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer unit lainnya	:	565.539.000,00
	w) Jurnal koreksi atas belanja modal peralatan komputer lainnya_komputer unit	:	6.750.000,00
	x) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer unit lainnya	:	3.910.000,00
	y) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal peralatan jaringan	:	1.350.000,00
	z) Jurnal koreksi atas belanja modal peralatan komputer lainnya	:	10.530.000,00
	â) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modala jaringan	:	7.700.000,00
	ä) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat studio lainnya_peralatan komputer lainnya	:	14.000.000,00
	ö) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal peralatan jaringan	:	24.500.000,00



(3)	Koreksii berkurang (Kredit)	:	1.489.645.200,00
	a) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat studio lainnya	:	95.100.000,00
	b) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal alat kantor lainnya	:	300.260.700,00
	c) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal lemari dan arsip pejabat	:	13.986.000,00
	d) Jurnal Koreksi ats reklasifikasi belanja modal alat komunikasi lainnya	:	16.997.000,00
	e) Jurnal koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer jaringan	:	50.700.000,00
	f) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal komputer lainnya	:	785.974.000,00
	g) Jurnal Koreksi atas reklasifikasi belanja modal peralatan jaringan	:	194.847.500,00
	h) Jurnal koreksi atas belanja modal peralatan komputer lainnya	:	31.780.000,00
(4)	Mutasi Bertambah (Debet)	:	2.070.846.110,00
	a) Jurnal koreksia atas serah terima barang berasal dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	:	311.319.500,00
	b) Jurnal koreksi atas serah terima barang berasal dari DPPPKB PP dan PA	:	26.794.860,00
	c) Belanja modal alat kantor lainnya	:	300.260.700,00
	d) Belanja modal alat pendingin	:	19.092.050,00
	e) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)	:	4.390.000,00
	f) Belanja modal lemari arsip pejabat	:	27.972.000,00
	g) Belanja modal Alat studio Lainnya	:	95.100.000,00
	h) Belanja modal alat komunikasi lainnya	:	16.997.000,00
	i) Belanja modal komputer jaringan	:	50.700.000,00
	j) Belanja modal komputer unit lainnya	:	785.974.000,00
	k) Belanja modal peralatan jaringan	:	400.466.000,00
	l) Belanja modal peralatan komputer lainnya	:	31.780.000,00
(5)	Mutasi berkurang (kredit)	:	264.030.000,00
	a) Jurnal Koreksi atas serah terima barang ke Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo	:	264.030.000,00
(6)	Saldo Per 31 Desember 2023	:	8.894.282.014,00

c. Gedung dan Bangunan

Tabel III.19 menunjukkan bahwa Saldo Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.553.176.950,00,00 yang berarti tidak adanya mutasi/koresi debet maupun kredit pada TA 2023.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada table Tabel III.16 Aset Tetap TA 2023 dan TA 2022 Aset Jalan,Irigasi,dan Jaringan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai yang sama yaitu 17.600.000,00 yang berarti tidak adanya mutasi/koresi debet maupun kredit pada TA 2023.



e. Akumulasi Penyusutan

Pada table di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar (Rp7.048.801.611,00), Jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar (Rp6.153.462.681,00), mengalami kenaikan sebesar (966.593.227,00) atau 14,55%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini.

Tabel Akumulasi Penyusutan TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Saldo TA 2022 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
AKUMULASI PENYUSUSTAN						
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.929.012.069,00)	0,00	906.496.815,00	264.030.000,00	252.872.115,00	(6.752.401.711,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(177.161.556,00)	00,00	29.657.543,00	0,00	0,00	(206.819.099,00)
Akumulasi penyusutan Alat Angkutan	(644.386.639,00)	00,00	58.976.846,00	264.030.000,00	252.872.115,00	(692.205.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(12.423.680,00)	00,00	71,040,00	0,00	0,00	(12.494.130,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah tangga	(737.437.494,00)	00,00	148.943.263,00	0,00	0,00	(886.380.757,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(721.472.731,00)	00,00	155.335.153,00	0,00	0,00	(874.807.884,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(4.124.321,00)	00,00	4.327.899,00	0,00	0,00	(8.452.220,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(3.632.005.648,00)	00,00	439.235.783,00	0,00	0,00	(4.071.241.431,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(216.457.279,00)	00,00	7.069.288,00	0,00	0,00	(287.526.567,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(216.457.279,00)	00,00	7.069.288,00	0,00	0,00	(287.526.567,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(7.993.333,00)	00,00	880.000,00	0,00	0,00	(8.873.333,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(7.993.333,00)	00,00	880.000,00	0,00	0,00	(8.873.333,00)
Jumlah	(6.153.462.681,00)	00,00	906.496.815,00	264.030.000,00	252.872.115,00	(7.048.801.611,00)



Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

		Dalam Rupiah
(1)	Saldo Per 31 Desember 2022	(5.186.869.454,00)
(2)	Koreksi berkurang (Kredit)	906.496.815,00
	Jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset tetap tahun 2023	906.496.815,00
(3)	Mutasi bertambah (Debet)	264.030.000,00
	Jurnal koreksi atas serah terima barang ke Bagian Umum Sekretariat Daerah	264.030.000,00
(4)	Mutasi berkurang (Kredit)	252.872.115,00
	Jurnal koreksi atas serah terima barang ke Bagian Umum Sekretariat Daerah	252.872.115,00
(5)	Saldo Per 31 Desember 2023	(7.048.801.611,00)

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp765.349.607,00 sedangkan TA 2022 Rp,865.889,000,00 bisa dikatakan mengalami *Penurunan* sebesar Rp100.539.786,00 atau 13,14% berasal dari koreksi berkurang (Kredit) Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud yang merupakan penyesuaian atas beban penyusutan aset tetap tahun 2023,dan koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan asset rusak berat sebesar Rp1,00.

3. Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp10.026.823,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar 3.981.504,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp6.045.319,00 atau 151,84%. Kewajiban Dinas Komunikasi sepenuhnya berasal dari Utang Belanja Barang dan Jasa , dengan rincian koreksi/mutasi Debit maupun Kredit sebagaimana Tabel dibawah ini:

Uraian	Saldo TA 2022 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
KEWAJIBAN						
Utang Belanja	3.981.504,00	4.470.040,00	10.515.359,00	0,00	0,00	10.026.823,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	488.536,00	488.536,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.981.504,00	3.981.504,00,00	10.026.504,00	0,00	0,00	10.026.823,00
Jumlah	3.981.504,00	4.470.040,00	10.515.359,00	0,00	0,00	10.026.823,00



Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

		Dalam Rupiah
(1)	Saldo Per 31 Desember 2022	3.981.000,00
(2)	Koreksi Bertambah (Debet) dari	4.470.040,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran utang belanja pegawai tahun lalu	488.536,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran utang beban tagihan telepon tahun lalu	46.234,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran utang beban tagihan air tahun lalu	27.000,00
	Jurnal koreksi atas pembayaran utang beban tagihan listrik tahun lalu	3.908.270,00
(3)	Koreksi Berkurang (Kredit) dari	10.515.359,00
	Jurnal Koreksi atas pembayaran utang belanja pegawai tahun lalu	488.536,00
	Jurnal koreksi atas utang beban tagihan telepon ang belum di bayar tahun berjalan	45.734,00
	Jurnal koreksi atas utang beban tagihan air yang belum di bayar tahun berjalan	231.380,00
	Jurnal koreksi atas utang beban tagihan telepon ang belum di bayar tahun berjalan	9.749.709,00

4. Ekuitas

kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.320.061.633,00 dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.803.222.779,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp516.838.854,00 atau (08,91)% Hal ini di sebabkan karena adanya Koreksi dan Mutasi Debet dan Kredit yang terjadi pada Tahun 2023.



3.1. Laporan Operasional (LO)

3.3.1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan – Lo di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp511.748.349,00 jika dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp584.186.817,00 mengalami *penurunan* sebesar sebesar Rp72.438.468,00 atau 12,40%. Pendapatan LO di Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Pendapatan Asli Daerah-LO. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table III.23

Tabel III.23 Pendapatan-LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
	2022	2021	(Rp)	(%)
PENDAPATAN -LO				
<i>Pendapatan Retribusi Daerah-LO</i>	<i>511.748.349,00</i>	<i>584.186.817,00</i>	<i>(72.438.468,00)</i>	<i>(12,40)</i>
Retribusi Jasa Umum-LO	488.748.349,00	475.109.090,00	13.639.259,00	02,87
Retribusi Jasa Usaha-LO	23.000.000,00	109.077.727,00	(86.077.727,00)	(72,92)
Jumlah	<i>511.748.349,00</i>	<i>584.186.817,00</i>	<i>(72.438.468,00)</i>	<i>(12,40)</i>

1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum-LO di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 sebesar Rp488.748.349,00 sedangkan jika dibandingkan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp475.109.090,00 mengalami *penurunan* sebesar.Rp72.438.468,00 atau 12,40%.

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Usaha-LO di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2022 sebesar Rp23.000.000,00 sedangkan jika dibandingkan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp109.077.727,00 mengalami *penurunan* sebesar Rp86.077.727,00 atau 78,91%.



3.3.2. Beban-LO

Realisasi Beban Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp9.631.782.671,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.270.957.043,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.360.825.628,00 atau 16,45%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel III.24 sebagai berikut.

Tabel III.24 Beban-LO

NO	Uraian	Relisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2023	2022	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	2.792.634.460,00	2.778.510.870,00	14.123.590,00	0,51
2	Beban Persediaan	779.054.732,00	365.998.287,00	413.056.445,00	112,86
3	Beban Jasa	3.747.968.810,00	3.352.806.871,00	395.161.939,00	11,79
4	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.800.580,00	17.000.000,00	95.800.580,00	563,53
5	Beban Pemeliharaan	287.665.054,00	137.521.810,00	150.143.244,00	109,18
6	Beban Perjalanan Dinas	296.325.320,00	183.041.887,00	150.143.244,00	109,18
7	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	834.547.527,00	894.643.939,00	(60.096.412,00)	(06,72)
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	71.069.288,00	71.069.288,00	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan Intalasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	100.539.786,00	86.064.924,00	13.697.862,00	15,77
12	Beban Tak Terduga	142.200.000,00	0,00	142.200.000,00	-
13	Beban Lain- Lain	59.070.114,00	152.064.482,00	(92.994.368,00)	61,15
	Jumlah	9.631.782.671,00	8.270.957.043,00	1.360.825.628,00	16,45

1. Beban Pegawai

Pada table dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Pegawai TA 2023 sebesar Rp2.792.634.460,00 Jika dibandingkan dengan relisasi TA 2022 sebesar Rp2.778.510.870,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp14.123.590,00 atau 0,51%.

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2023	2022	(Rp)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.547.037.602,00	1.539.405.274,00	7.632.328,00	0,50
2	Beban Tambahan Penghasilaln ASN	1.245.596.858,00	1.239.105.596,00	6.491.262,00	0,52
	Jumlah	2.792.634.460,00	2.778.510.870,00	14.123.590,00	0,51



a. Beban Gaji dan Tunjangan

Pada table diatas menunjukkan bahwa Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan -LO TA 2021 adalah sebesar Rp1.547.037.602,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.539.405.274,00 mengalami *kenaikan* Rp7.632.328,00 atau 0,50%.

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Pada table di bawah ini menunjukkan bahwa Relaisasi beban tambahan penghasilan ASN TA 2023 adalah sebesar Rp1.245.596.858,00 da.n jika dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp1.239.105.596,00 mengalami *kenaikan* Rp6.491.262,00 atau 0.52%

2. Beban Persediaan

Pada table dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Persediaan TA 2023 adalah sebesar Rp779.054.732,00 Jika dibandingkan dengan relisasi TA 2022 sebesar Rp365.998.870,00 mengalmi *kenaikan* sebesar Rp413.096.445,00 atau 112,86%.sepenuhnya berasal dari Beban Bahan Pakai Habis.

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2023	2022	(Rp)	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	779.054.732,00	365.998.287,00	413.056.445,00	112,86
	Jumlah	779.054.732,00	365.998.287,00	413.056.445,00	112,86

3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa-LO TA 2023 adalah sebesar Rp3.860.769.3990,00 jika di bandingkan dengan Beban Jasa LO TA 2022 adalah Rp3.369.806.871,00 mengalami *kenaikan* sebserar Rp4990.962.519,00 atau 14,57% dengan rincian sebagaimana Tabel III.30 sebagai berikut:

Tabel III.30 Beban Jasa-LO

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2023	2022	Rp.	%
	BEBAN JASA-LO				
	Beban Jasa	3.747.968.810,00	3.352.806.871,00	395.161.939,00	11,79
1	Beban Jasa Kantor	3.527.413.249,00	3.208.188.714,00	319.224.535,00	09,95
2	Beban luran Jaminan/Asuransi	59.295.172,00	34.106.157,00	25.189.015,00	73.85



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	47.498.769,00	11.500.000,00	35.998.769,00	313,03
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.420.000,00	0,00	-	-
5	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	93.841.620,00	99.012.000,00	(5.170.380,00)	(05,22)
6	Beban kursus pelatihan sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	9.500.000,00	0,00	-	-
	Beban Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.800.580,00	17.000.000,00	95.800.580,00	563,53
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.800.580,00	17.000.000,00	95.800.580,00	563,53
	Jumlah	3.860.769.390,00	3.369.806.871,00	490.962.519,00	14,57

a. Beban Jasa Kantor

Realisasi Beban Jasa Kantor TA 2023 adalah sebesar Rp3.527.413.249,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp3.208.188.714,00,00 maka bisa dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp319.224.535,00,00 atau 09,95%.

b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 adalah sebesar Rp59.295.172,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp34.106.157,00 maka bisa dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp25.189.015,00 atau 73.85%.

c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban sewa Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp47.498.769,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp11.500.000,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp35.998.76,00 atau 313,03%.

d. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Beba Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp10.420.000,00. Sedangkat pada TA 2022 tidak ada realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan,

e. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Realisasi jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2023 adalah sebesar Rp93.841.620,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp99.012.000,00 dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp5.170.380,00 atau 05,22%.

f. Beban kursus pelatihan sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Beban kursus pelatihan sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan Pelatihan TA 2023 sebesar Rp9.500.000,00 sedangkan pada TA 2022 tidak ada realisasi Beban kursus pelatihan sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan Pelatihan.



- g. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Realisasi jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 dan TA 2021 adalah sebesar Rp9.500.000,00 atau dapat dikatakan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

4. Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika sepenuhnya berasal dari Realisasi Beban pemeliharaan . Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 adalah Rp287.665.054,00 apabila di bandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp137.521.810,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp150.143.244,00 atau 109,18%

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
			2022	Rp.	%
	BEBAN PEMLIHARAAN – LO				
	<i>Beban Pemeliharaan</i>				
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208.695.054,00	117.535.660,00	91.159.394,00	77,56
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.970.000,00	19.986.150,00	58.983.850,00	295,12
	Jumlah	287.665.054,00	137.521.810,00	150.143.244,00	109,18

- a. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp208.695.054,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 Rp117.535.660,00 maka bisa dikatakan mengalami *peningkatan* sebesar Rp91.159.394,00 atau 77,56%.

- b. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp78.970.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp19.986.150,00 maka dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar 59.983.850,00 atau 295,12%

5. Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika sepenuhnya berasal dari Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA 2023 sebesar Rp296.352320,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar 183.041.887,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp113.310.433,00 atau 61,90%.



6. Beban Hibah,Kepada Badan Lembaga organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum-LO

Realisasi Beban Hibah,Kepada Badan Lembaga organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Dinas Komunikasi dan Informatika sepenuhnya berasal dari Beban Hibah,Kepada Badan Lembaga organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum dengan realisasi TA 2023 sebesar 400.000.000,00 sedangkan pada TA 2022 tidak terdapat realisasi.

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas Komunikasi dan Informatika.realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-Lo TA 2023 sebesar Rp1.007.036.601,00 sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.053.435.151,00 dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp46,298.550,00 atau 06,72% Untuk Lebih Jelasnya, Uraian tersebut dapat di lihat secara rinci pada Tabel Berikut :

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2023	2022	Rp.	%
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO				
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	834.547.5270,00	894.643.939,00	(60.096.412,00)	(06,72)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	29.657.543,00	29.657.542,00	1,00	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	58.976.846,00	14.502.636,00	44.474.210,00	306,66
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	71.040,00	1.723.680,00	(1.652.640,00)	(95,88)
4	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.943.263,00	172.757.362,00	(23.814.099,00)	(13,78)
6	Beban Penyusutan Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	153.335.153,00	121.289.364,00	32.045.789,00	26,42
7	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.327.899,000	3.807.066,00	520.833,00	13,68
8	Beban Penyusutan Komputer	439.235.783,00	550.906.289,00	(111.670.506,00)	(20,27)
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.069.228,00	71.069.228,00	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempa Kerja	71.069.228,00	71.069.288,00	-	-
	Beban Penyusutan Jaln Jaringan dan Irigasi	880.000,00	880.000,00	-	-
10	Beban Penyusutan Instalasi	880.000,00	880.000,00	-	-
	Beban Amortisasi Aset tidak Berwujud	100.539.786,00	86.841.924,00	13.697.862,00	15,77
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	100.539.786,00	86.841.924,00	13.697.862,00	15,77
	Jumlah	1.007.036.601,00	1.053.435.151,00	(46.398.550,00)	(06,72)



- a. **Beban Penyusutan Alat Besar**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Besar TA 2023 adalah sebesar Rp29.657.543,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp29.657.542,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp1,00 atau kurang dari Nol koma satu persen.
- b. **Beban Penyusutan Alat Angkutan**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Angkutan TA 2023 adalah sebesar Rp58.976.846,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp14.502.636,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp44.474.210,00 atau 306,66%.
- c. **Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 adalah sebesar Rp71.040,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.723.680,00 dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp1.652.640,00 atau sebesar 95,88%.
- d. **Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023 adalah sebesar Rp148.943.263,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp172.757.362,00 dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp23.814.099,00 atau 13,78%.
- e. **Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar TA 2023 adalah sebesar Rp153.335.153,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp121.289.364,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp32.045.789,00 atau 26,42%.
- f. **Beban Penyusutan Alat Laboratorium**
Realisasi Beban Penyusutan Alat Laboratorium TA 2023 adalah sebesar Rp4.327.899,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.807.066,00 dapat dikatakan mengalami *kenaikan* sebesar Rp520.833,00 atau 13,68%.
- g. **Beban Penyusutan Komputer**
Realisasi Beban Penyusutan komputer TA 2023 adalah sebesar Rp439.235.783,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp550.906.289,00 maka dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp111.670.506,00 atau 20,27%



h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Realisasi Beban Penyusutan instalasi kerja TA 2023 adalah sebesar Rp100.539.786,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp86.841.924,00 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp13.697.862,00 atau 15,77%.

8. Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain –lain -LO Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp59.070.11400, yang sepenuhnya Berasal dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, dan apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp152.064.482,00 dapat dikatakan mengalami *penurunan* sebesar Rp99.994.368,00 atau 61,15%.

9. Beban Tak Terduha

Realisasi Beban Tak Terduga-LO Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp142.200.00,00, yang sepenuhnya Berasal dari Jurnal koreksi atas realisasi belanja paket peralatan jaringan intranet, sedangkan pada TA 2022 tidak terdapat realisasi.

3.3.3. Surplus/(Defisit) dari Operasi

Realisasi Pendapatan-LO TA 2023 sebagaimana penjelasan diatas maka diperoleh defisit operasi sebesar (Rp 8.970.834.322,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar (Rp7,450,486.945,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami *kenaikan* sebesar Rp1.520.347.377,00 atau 20,41%.

3.3.4. Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2023 Dinas Komunikasi dan Informata tidak terdapat Kegiatan Non Oprasional

3.3.5. Surplus/Defisit-LO

Berdasarkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit luar biasa pada TA 2023 diatas maka diperoleh defisit-LO sebesar (Rp8.970.834.322,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar (Rp7.343.149.945,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami *kenaikan* sebesar Rp1.627.684.377,00 atau 22,17%.



3.2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2023. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.320.061.633,00 dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.803.222.779,00 ditambah surplus/defisit LO TA 2023 sebesar (Rp8.970.834.322,00) ditambah dampak kumulatif/kesalahan mendasar TA 2023 sebesar Rp84.753.710,00 ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp9.402.919.466,00.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp 5.803.222.779,00 berasal dari Saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.803.222.779,00

2. Surplus/(Defisit) LO TA 2023

Berdasarkan Laporan Operasional TA 2023 menunjukkan bahwa defisit LO Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar (Rp8.970.834.322,00)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Sementara itu pada TA 2023 terdapat Dmpak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp84.753.710,00 yang berasal dari:

- a) Mutasi Aset Tetap antar SKPD Rp85.242.245,00
- b) Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan Rp1,00
- c) Koreksi kurang catat utang Rp488.536,00

4. Kewajiban yang di konsolidasikan sebesar Rp9.402.919.466,00



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Wonosobo lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebelum menjadi Dinas tersendiri, urusan komunikasi dan informatika ditangani oleh Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika. Setelah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, urusan komunikasi dan informatika menjadi salah satu bagian dalam Sekretariat Daerah yaitu Bagian Komunikasi dan Telematika Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, Dinas Kominfo merupakan Dinas Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik. Sebagai salah satu pilar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo berkewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2020 - 2024 yaitu **“MEWUJUDKAN WONOSOBO MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Harapan dari ini semua tidak lain adalah terciptanya layanan informasi kepada masyarakat secara luas, transparan dan akuntabel sebagai wujud dari pertanggung jawaban pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat



Dalam mengelola keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh para Pejabat Pengelola Keuangan, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Pengelola Keuangan	Nama	NIP	JABATAN
1	Pengguna Anggaran	Fahmi Hidayat. S.IP..M.P.P	197108251999031006	Kepala Dinas
2	PPK SKPD	Edi Santoso, S.STP., M.Si.	197706081996021001	Sekretaris Dinas
3	Bendahar Pengeluaran	Retno Lestari	19691018199212001	Pelaksana
4	Bendahara Penerimaan	Supraygi, A.Md.Kom	198002072010011015	Pelaksana
5	Bendahara Pengurus Barang	Dwi Puji Haryono, S.IP	197304082009011003	Pelaksana
6	Bendahara Urusan Gaji	Suwarti	196701011989032018	Pelaksana

Sementara itu dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika memberdayakan personil yang ada dengan data sebagai berikut.

Tabel IV.3
Data Karyawan Tahun Anggar 2023

NO	Golongan	Jumlah
1	ASN Golongan IV	5 orang
2	ASN Golongan III	14 orang
3	ASN Golongan II	2 orang
4	PPPK (Kelas Jabatan 9)	4 orang
5	Non ASN	40 orang
	Jumlah	65 orang



BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan TA 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam TA 2023 serta realisasi TA sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonorejo TA 2023.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO



FAHMI HIDAYAT, S.IP..M.P.P

Pembina Tk.I

NIP. 197108251999031006